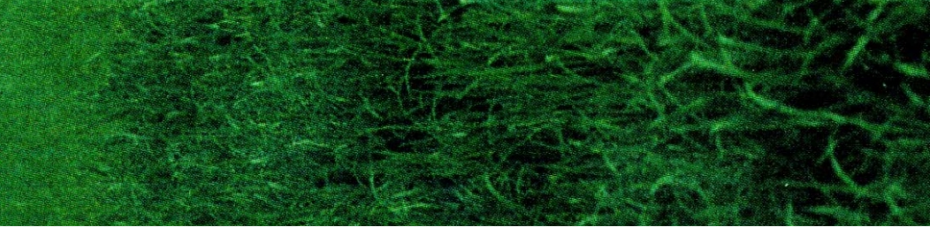

AKATIGA pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada empat topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. Pertama, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial dengan isu sentral seputar kebijakan pengupahan, pengorganisasian buruh, dan pola-pola sengketa perburuhan. Kedua, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat dengan fokus kepada persoalan struktural yang dihadapi usaha kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk mengakumulasi modal. Ketiga, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat yang difokuskan kepada isu struktur relasi agraria. Keempat, isu demokratisasi lokal yang bertujuan untuk memberikan pandangan kritis terhadap berbagai inisiatif di kalangan 'civil society' maupun pemerintah. Keempat topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

YAYASAN AKATIGA

Pusat Analisis Sosial
Jl. Tubagus Ismail II / 2,
Bandung 40134, Indonesia
Telp. 022-2502302, Fax. 022-2535824
E-mail : akatiga@akatiga.or.id
Homepage : www.akatiga.or.id

MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN MELALUI SISTEM PANGAN LOKAL

mewujudkan kedaulatan pangan melalui sistem pangan lokal

studi kasus kabupaten klaten

tri hadiyanto sasongko
yulia indrawati sari

MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN MELALUI SISTEM PANGAN LOKAL

Tri Hadiyanto Sasongko
Yulia Indrawati Sari

AKATIGA

MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN MELALUI SISTEM PANGAN LOKAL
Studi Kasus Kabupaten Klaten

Penulis : Tri Hadiyanto Sasongko
Yulia Indrawati Sari
Tata Letak dan Disain Sampul : Pamuji Slamet

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Tri Hadiyanto Sasongko
Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Sistem Pangan Lokal /
Tri Hadiyanto Sasongko.
Yayasan AKATIGA, 2006
XII, 48 hlm.; 19 cm

Buku ini diterbitkan oleh:
Cetakan pertama, Mei 2005
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Bogor
Cetakan kedua, November 2006
AKATIGA Pusat Analisis Sosial, Bandung

Bibliografi:

1. Petani 2. Kedaulatan Pangan 3. Sistem Pangan Lokal
I. Judul

Kata Pengantar
SISTEM PANGAN LOKAL: Media Perlawanan Petani?

Telah banyak studi dan tulisan-tulisan yang menganalisis bagaimana modernisasi di bidang pangan dan pertanian, telah menyebabkan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan dan marginalisasi petani, bahkan telah menyebabkan hilangnya berbagai institusi dan pengetahuan yang dimiliki oleh petani di dunia ketiga. Petani tidak memiliki lagi kedaulatan pangan, yaitu hak untuk mengakses dan mengontrol faktor-faktor yang penting untuk menjadi pertanian sebagai jalan hidupnya. Sistem pangan lokal, kemudian dipandang sebagai salah satu cara (yang strategis) untuk mengembalikan kedaulatan petani sebagai produsen pangan. Pertanyaannya apakah sistem pangan lokal itu mungkin untuk dilakukan? Kerjasama KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan) dan Yayasan AKATIGA dibangun untuk bersama-sama menjawab pertanyaan tersebut. Buku ini ditulis berdasarkan perjalanan hasil studi antara Yayasan AKATIGA dan KRKP untuk mencoba menggambarkan kemungkinan melakukan sistem pangan lokal sebagai jalan alternatif mencapai kedaulatan petani.

Suatu uji coba dan ide sistem pangan lokal tidak dapat diwujudkan tanpa didahului oleh riset, melihat dan menurunkan ide-ide besar ke dalam realita yang ada. Secara

sederhana, studi ini kemudian berusaha mencari dan menemukenali situasi pangan lokal yang terjadi. Situasi pangan lokal ini kemudian dianalisis untuk melihat ruang-ruang ketergantungan yang telah tercipta dan ruang-ruang kemandirian apa yang masih tersisa, bagaimana ruang-ruang ketergantungan diperkecil dan bagaimana ruang-ruang kemandirian dikembangkan.

Faktanya tidak sesederhana itu. Melihat situasi pangan lokal berarti menerobos dan melihat bagaimana sistem kapitalisme telah mengakar ke dalam kehidupan perekonomian pedesaan baik di sisi produksi maupun konsumsinya. Membongkar dan kemudian berusaha menemukan cara-cara dan ruang-ruang peluang untuk memulai sistem pangan lokal tidak mudah. Buku ini dengan demikian tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang cara-cara melakukan sistem pangan lokal yang kemudian menjadi resep manjur dan langsung dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan konteks.

Buku ini adalah pemikiran penulis saat memotret fakta-fakta mengenai situasi pangan lokal di Kabupaten Klaten pada tahun 2004. Fakta-fakta yang diperoleh mengenai situasi pangan lokal ini kemudian dikaitkan dengan realistiskah melakukan sistem pangan lokal dan seberapa lokal? Buku ini akan berisi bagian-bagian mengenai keragaman situasi pangan lokal, dan sedikit pencerahan karena ternyata masih ada ruang-ruang kemandirian petani yang dapat menjadi pintu masuk untuk menguatkan dan menjaga ruang-ruang tersebut. Buku ini kemudian diakhiri dengan memberikan sejumlah rekomendasi yang berisi langkah-langkah awal untuk menerapkan sistem pangan lokal.

Buku ini adalah cetakan kedua. Cetakan pertama diterbitkan April 2005 oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Ada

beberapa penambahan materi di Bab 1 untuk lebih memperbaiki dan mengelaborasi beberapa definisi yang digunakan. Selain materi, terdapat perubahan tata letak dan sampul buku.

Didalam menuntaskan buku ini, ucapan terima kasih hendak disampaikan kepada seluruh teman-teman di jaringan KRKP yang aktif terlibat didalam diskusi-diskusi baik formal maupun informal yang memberikan masukan di tahap penyusunan proposal maupun pada tahap akhir yaitu perumusan temuan hasil studi. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Pak Slamet, Pak Putut dan Mas Wening yang secara aktif sangat membantu proses dan diskusi penelitian di Klaten, juga atas diskusi-diskusi dan masukan-masukannya. Juga kepada teman-teman FKIP (Forum Komunikasi dan Informasi Petani) dan Jarnop (Jaringan Ornop Pendamping Petani) di Kabupaten Klaten. Kepada teman-teman Persepsi di Klaten dan khususnya Yuni Pristiwati. Juga kepada mereka semua yang telah membantu perumusan proposal dan penulisan kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena cukup banyak masukan yang tidak dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu, dan data. Terima kasih pula kami sampaikan kepada OXFAM GB, Mas Bastian dan Mbak Lya.

Akhirnya, harapan kami buku dapat memberikan bahan diskusi awal yang akan terus dipertajam dan dikritisi mengenai sistem pangan lokal sebagai jalan alternatif mencapai kedaulatan petani… Atau adakah jalan yang lain?

Bandung, April 2005

Yulia Indrawati Sari
Direktur Eksekutif Yayasan AKATIGA

Kata Pengantar
KEDAULATAN PANGAN DAN PEMBARUAN SISTEM PANGAN KOMUNITAS

Sampai saat ini situasi pangan rakyat tidak kunjung membaik, bahkan semakin terpuruk. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki laut yang luas dengan daratan yang subur serta kekayaan sumber alam yang melimpah harus menghadapi kenyataan bahwa sebagian dari penduduknya mengalami kekurangan pangan, bahkan kelaparan. Data Badan Bimas Ketahanan Pangan (2003), pada tahun 2002 terdapat 21,7 persen penduduk rawan pangan: 15 persen merupakan penduduk rawan pangan dan 6 persen merupakan penduduk sangat rawan pangan. Selain itu sekitar 7,5 juta wanita usia 1545 tahun menderita kurang gizi serta 50% ibu hamil dan 30% anak usia sekolah menderita anemia akibat kekurangan gizi. Daerah rawan pangan juga meningkat dari 40,5% pada 2001 menjadi 48,0% dari total kabupaten/kota pada 2002. Sekitar 305.000 bayi dan anak balita meninggal setiap tahunnya, kurang lebih 180.000 di antaranya meninggal dengan penyebab dasar kekurangan gizi.

Data tersebut sangat ironis, karena di tengah arus pembaharuan (baca: reformasi) di segala bidang kehidupan dan saat dikumandangkannya berbagai janji perubahan dari rezim pemerintah pasca-Orde Baru, ternyata perubahan yang telah "dijanjikan" dan sedang "dilakukan" masih belum menyentuh hal yang paling asasi dari kehidupan rakyat,

yaitu persoalan pangan. Pangan yang diakui sebagai hak asasi manusia masih menjadi cita-cita normatif dibanding upaya implementatif untuk pemenuhannya.

Kondisi tersebut dengan situasi yang sangat memprihatinkan yang dialami oleh petani sebagai produsen pangan. Petani sebagai aktor utama dalam produksi pangan, sebagian besar masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan dalam berbagai kasus justru mengalami situasi rawan pangan dan kelaparan. Petani pangan di Indonesia harus menghadapi proses marginalisasi berkepanjangan dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan terutama di sektor pertanian dan pangan.

Sejak tahun 1998 petani Indonesia tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari negara dari tekanan liberalisasi perdagangan global. Berbagai subsidi dan kebijakan proteksi untuk petani satu per satu dicabut dan direduksi demi kepatuhan pada agenda liberalisasi perdagangan. Petani Indonesia yang mayoritas berlahan sempit dan berskala usaha kecil menjadi semakin terpuruk ketika bangunan sistem pangan rakyat kini telah rapuh terdesak oleh sistem pangan global. Petani semakin tergantung pada berbagai input produksi dari luar, yang harganya semakin melambung tinggi. Sementara itu nilai tukar produk pertanian semakin menurun di tengah kejatuhan harga produk petani yang disebabkan membanjirnya produk pangan impor.

Buku ini hadir atas dasar keprihatinan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) sebagai koalisi organisasi masyarakat sipil yang mempunyai perhatian besar terhadap persoalan pangan serta kondisi petani dan pertanian secara umum. KRKP memandang bahwa persoalan mendasar dari keterpurukan situasi pangan rakyat, justru karena semakin lemahnya akses rakyat terhadap sumber-sumber produktif untuk pangan, serta ketidakberdaulatan rakyat untuk menentukan sistem pangannya sendiri. Dalam situasi keterpurukan sistem pangan rakyat diperlukan sebuah upaya radikal untuk mengubahnya. Perubahan itu harus

melalui agenda gerakan rakyat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas pangan. Kedaulatan pangan *adalah hak setiap orang, kelompok masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengontrol berbagai sumberdaya produktif serta menentukan sendiri kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi pangannya sesuai dengan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing.*

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan pada tingkat komunitas? Masih adakah sistem pangan lokal yangmampu mencerminkan keberdaulatan petani di tengah tekanan sistem pangan global yang diusung rezim liberalisasi perdagangan? Dan masih adakah peluang dan ruang-ruang untuk pengembangan sistem pangan lokal berbasis komunitas?

Buku ini merupakan rumusan hasil penelitian yang dirancang sebagai prakarsa awal untuk menjawab pertanyaan di atas. Sebagai langkah awal, maka penelitian ini bermaksud untuk mengelaborasi situasi pangan rakyat dan menganalisis ruang-ruang kemandirian masyarakat sebagai basis untuk pengembangan sistem pangan lokal sebagai antitesis dari system pangan global yang dianut oleh rezim liberalisasi perdagangan. Harapannya hasil penelitian ini bisa membantu untuk analisis bersama dalam menyusun strategi pembaharuan sistem pangan komunitas. Pembaharuan sistem pangan komunitas merupakan salah satu agenda yang diharapkan mampu memberikan alternatif dari sistem pangan global yang cenderung eksploitatifdan menghasilkan ketergantungan petani.

Dengan demikian buku ini sangat berguna dalam memperkaya pemahaman KRKP sebagai jaringan organisasi masyarakat sipil, terutama pemahaman atas situasi nyata yang dialami masyarakat pedesaan terutama terkait dengan aksesnya terhadap pangan, dinamika situasi produksi, distribusi dan konsumsi pangan, serta terutama analisisnya yang menggambarkan ruang-ruang kemandirian yang masih mungkin menjadi modal dan acuan untuk pengembangan sistem pangan lokal. Untuk itu KRKP memberikan apresiasi

sebesar-besarnya kepada tim riset AKATIGA yang telah bekerja keras mengerahkan segala dukungannya, mulai dari perencanaan awal hingga selesainya penulisan buku ini. KRKP juga mengucapkan terima kasih kepada Forum Informasi dan Komunikasi Petani (FKIP), Jaringan Ornop Pendamping Petani (Jarnop), serta PERSEPSI atas segala bentuk dukungannya untuk pelaksanaan penelitian di Klaten, Jateng. Ungkapan penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Oxfam GB yang telah memberikan dukungan dan kerjasama sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Mewujudkan kedaulatan rakyat atas pangan bukan seperti membalik telapak tangan dan juga tidak akan terjawab tuntas hanya dengan hadirnya buku ini. Tantangan terbesar dari persoalan pangan adalah justru bagaimana persoalan berat tersebut diurai secara sederhana terutama selaras dengan dinamika situasi pangan yang nyata dirasakan masyarakat. Dengan demikian akan mampu dirumuskan langkah-langkah dasar berdasarkan peluang dan potensi yang ada pada rakyat sendiri. Buku ini telah mengawali hal tersebut, semoga mampu mengundang diskusi yang lebih mendalam oleh berbagai pihak, terutama memberi semangat dan keberanian untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas pangan.

Bogor, 15 Mei 2005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar III
Kata Pengantar KRKP VII
Daftar Isi XI

Bab 1 Pendahuluan 1
Ketidakdaulatan Petani dan Sistem Pangan Lokal 1
Tujuan Penelitian 6
Metode Penelitian 7

Bab 2 Situasi Pangan Lokal 17

Bab 3 Rekomendasi 27
Rekomendasi bagi Kecamatan Bayat 28
Rekomendasi Umum 38

Daftar Pustaka 47

BAB I
PENDAHULUAN

Ketidakdaulatan Petani dan Sistem Pangan Lokal

Persoalan besar yang dihadapi petani produsen pangan[1] adalah semakin kecilnya ruang sosial, ekonomi, dan politik yang tersedia yang memungkinkan mereka mampu menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, kepada siapa produk tersebut harus dijual dan bagaimana sistem penjulannya serta bagaimana mereka mengakses semua kebutuhan pangannya. Petani yang merupakan produsen pangan sebenarnya mempunyai peluang besar untuk menjadi pihak yang paling berdaulat atas pangan (karena mampu memproduksi sendiri pangannya), justru menjadi pihak yang tidak berdaulat baik dari sisi produksi pangan, distribusi pangan hingga ke pemenuhan konsumsi rumah tangga mereka.

Pada ruang **produksi**, banyak *input-input* pertanian yang berasal dari luar dan memunculkan ketergantungan petani pada berbagai asupan mulai dari pupuk, pestisida, hingga benih pabrikan. Distri-

---

1 Dalam konteks penelitian ini, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air yang biasa dikonsumsi oleh manusia sehari-hari, baik berupa beras (atau makanan sumber karbohidrat lainnya), palawija, sayur-sayuran, ataupun buah-buahan.

busi asupan terutama pupuk dan pestisida banyak mengandung muatan impor dan masih dimonopoli oleh segelintir pihak sehingga harga asupan menjadi mahal dan tidak dapat diprediksi dan dikontrol oleh petani.

Pada ruang **distribusi**, petani dihadapkan pada mekanisme distribusi yang mahal, dengan mata rantai yang panjang. Bahkan terdapat kecenderungan untuk mengekstraksi semua komoditi pangan terbaik petani keluar dari kawasan pedesaan tersebut (baca: ke kota). Margin keuntungan paling besar ada di pelaku-pelaku distribusi dan harga di petani dibeli dengan sangat murah yang tidak sebanding dengan kerja dan biaya-biaya produksi.

Pada ruang **konsumsi**, ketika seluruh hasil panen petani dijual untuk menutupi biaya produksi yang tinggi saat itulah petani menjadi sangat tergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Maka sebagian besar petani terutama petani tunakisma menjadi pembeli beras (yang kualitasnya lebih jelek dari yang diproduksi sendiri). Petani yang juga merupakan produsen pangan lokal seperti singkong, jagung, juga harus berhadapan dengan berbagai produk makanan instan yang kemudian lebih banyak dikonsumsi sebagai pangan alternatif pengganti beras.

Gambaran singkat di atas menunjukkan buramnya potret kedaulatan pangan petani. Kecilnya ruang-ruang tersebut menyebabkan peluang mereka untuk menentukan strategi ekonomi dan sosial yang tepat dengan kepentingan mereka juga semakin lemah dan terbatas. Negara, sebagai sebuah institusi pengaturan paling berdaulat juga tidak membantu situasi ini, malah meluncurkan berbagai kebijakan yang memperburuk kondisi ini. Kondisi ini umum disebut sebagai keadaan ketika petani 'tidak mempunyai kedaulatan atas pangan'. Idealnya, *kedaulatan pangan* menjadi suatu yang penting dimiliki oleh masyarakat produsen di pedesaan. Dalam studi ini, kedaulatan pangan diartikan sebagai seperangkat hak masyarakat untuk:

(1) menentukan cara mengakses dan mengontrol, memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi pangannya;
(2) melindungi dan mengatur mekanisme produksi dan perdagangan komoditi pangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pengembangan sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan
(3) menentukan sejauh mana mereka bisa menggunakan (atau tidak menggunakan) pasokan pangan dan asupan produksi pangan yang datang dari luar area 'lokalnya'.
(4) membatasi atau menolak praktik-praktik *dumping* komoditi pangan ke pasaran lokal yang akan mengganggu kelangsungan distribusi pangan yang disediakan oleh produsen lokal.
(5) komuniti-komuniti produsen komoditi pertanian dan perikanan memperoleh prioritas untuk menata penggunaan serta hak atas sumber daya agraria sesuai dengan kemampuan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, dan lingkungannya.

Dengan demikian, kedaulatan pangan bukan hanya sekedar seperangkat hak, tetapi suatu kondisi dimana petani memiliki akses dan kontrol terhadap sumber-sumber agraria sehingga mereka mampu menentukan sendiri apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsinya dengan cara dan mekanisme yang memang paling tepat bagi mereka.

Salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut adalah dengan memprakarsai pembentukan **sistem pangan lokal**. Dalam konteks studi ini, sistem pangan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian jaringan produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang ada di suatu lokalitas pedesaan tertentu. Dalam tahapan produksi, sumber daya, asupan serta aktor/institusinya sedapat mungkin masih berasal dari kawasan tersebut. Hasil panen kemudian didistribusikan melalui suatu sistem pasar yang mendahulukan kepentingan masyarakat miskin sehingga produk terbaik petani masih dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang bersangkutan. Pembentukan sistem pangan lokal sangat mempertimbang-

kan petani sebagai produsen pangan tersebut harus dapat menikmati hasil panen terbaiknya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangganya sebelum di jual ke pasar. Dengan demikian Petani sebagai produsen tidak semata-mata berfungsi sebagai pemasok kebutuhan pihak lain.

Konsep sistem pangan lokal ini dengan demikian berbeda dengan konsep ketahanan dan kemandirian pangan yang cenderung hanya merujuk pada jaminan akan ketersediaan bahan pangan bagi suatu masyarakat di kawasan tertentu tanpa mempermasalahkan bagaimana proses produksinya, bagaimana proses pendistribusiannya serta bagaimana mekanisme rakyat memperoleh pangan tersebut. Sistem pangan lokal, sebagai suatu rangkaian jaringan produksi, distribusi dan konsumsi pangan bukan hanya memfokuskan diri pada penyediaan pangan, namun juga pada bagaimana petani dan masyarakat desa pada umumnya dapat berdaulat menentukan sendiri bagaimana mekanisme produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang cocok bagi mereka. Sistem pangan lokal dibangun atas semangat bahwa masyarakat suatu komuniti tertentu harus memiliki kedaulatan untuk mengakses dan mengontrol bagaimana cara-cara produksi, distribusi, dan konsumsi kebutuhan pangannya. Hal inilah yang tidak terdapat dalam konsep ketahanan dan kemandirian pangan.

Tentu saja, prakarsa membangun sistem pangan lokal tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada sejumlah 'prasyarat ideal' yang perlu dipenuhi di daerah yang bersangkutan agar prakarsa sistem pangan lokal lebih mudah untuk dilakukan (lihat boks 1.1).

Boks 1.1
Prasyarat Memprakarsai Sistem Pangan Lokal

Produksi
- Harus ada akses dan kontrol petani terhadap tanah.
- Harus ada sistem produksi yang ditujukan untuk konsumen di tingkat lokal
- Harus ada keragaman pangan yang tinggi yang memang dibudidayakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat lokal
- Harus ada cara produksi dan relasi-relasi produksi yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan alam petani di tingkat lokal.
- Harus ada sistem produksi yang memungkinkan petani mempunyai kedaulatan untuk menentukan asupan bibit dan pestisida.
- Harus ada interaksi, kolaborasi antara produsen-produsen komoditi pangan yang berbeda di tingkat lokal yang didasarkan pada solidaritas sesama produsen. Pemenuhan kebutuhan akan pangan di tingkat lokal menjadi prioritas dan tujuan utama dari bentuk-bentuk kolaborasi ini.

Distribusi
- Harus ada interaksi antara produsen dengan konsumen di tingkat lokal yang hubungannya tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan komersial, tapi juga berdasarkan solidaritas antara warga dan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kedaulatan pangan di tingkat lokal.
- Harus ada mekanisme-mekanisme pendistibusian pangan lokal yang dibangun oleh produsen bersama dengan konsumen.
- Harus ada institusi pasar yang secara khusus melayani konsumen di tingkat lokal
- Harus ada forum-forum yang menjamin terjadinya komunikasi antar produsen dan antara produsen dengan konsumen.

Konsumsi
- Pola makan yang mengandalkan bahan pangan yang dapat

diproduksi atau diolah di tingkat lokal dengan mutu yang terbaik
- Harus ada institusi organisasi tani yang mengatur cadangan pangan di tingkat keluarga, komuniti, dan lingkungan masyarakat pedesaan yang lebih luas

Advokasi dan kebijakan peraturan daerah
- Harus ada peraturan-peraturan di tingkat daerah yang menjamin kebebasan relatif para produsen untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan
- Harus ada peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menghadang intervensi produk-produk luar daerah perdesaan yang potensial mengganggu pasar lokal dan sistem pangan lokal yang ada.
- Harus ada institusi dan organisasi tani dan konsumen lokal yang cukup kuat untuk melakukan advokasi atau tekanan ketika ada keputusan dan praktik-praktik pemerintah maupun pengusaha yang merugikan produsen dan konsumen lokal.

Tujuan Penelitian

Untuk memprakarsai terbentuknya sistem pangan lokal diperlukan sejumlah informasi yang berkaitan dengan **situasi pangan lokal** di kawasan yang bersangkutan. Gambaran tentang situasi pangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi peta situasi ketergantungan dan kedaulatan pangan yang terjadi di lokalitas tertentu serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi situasi tersebut. Informasi seperti ini sangat diperlukan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan untuk memprakarsai sistem pangan lokal di tempat tersebut.

Secara umum situasi pangan dapat dilihat sebagai proses dan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, hubungan apa yang tercipta di an-

tara aktor yang terlibat di dalam sistem pangan yang ada, aktor-aktor yang terlibat dalam masing-masing tahapan tersebut serta kebijakan-kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung berdampak pada kondisi pangan di kawasan yang bersangkutan.

Ada beberapa pertanyaan penting yang ingin dijawab dalam rangka mendapatkan gambaran tentang situasi pangan di tingkat lokal:

(1) Bagaimana (proses, mekanisme, cara-cara) produksi, distribusi dan konsumsi pangan di kawasan penelitian?
(2) Siapa saja aktor/institusi yang terlibat di dalam proses tersebut serta bagaimanakah hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang terjalin di antara aktor-aktor tersebut?
(3) Faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi corak hubungan di antara aktor-aktor tersebut? (termasuk di dalamnya efek-efek dari kebijakan tertentu)
(4) Bagaimana situasi ketergantungan dan kedaulatan pangan warga lokal di dalam sistem pangan yang berlaku sekarang? Dalam hal apa ketergantungan/kedaulatan itu terjadi?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang bersifat kualitatif. Metode ini digunakan karena peneliti ingin membuat gambaran mengenai bagaimanakah proses produksi, distribusi dan konsumsi pangan di kawasan penelitian, serta situasi ketergantungan dan kedaulatan di kawasan tersebut.

Lokasi Penelitian

Meskipun secara umum, penelitian ini ditujukan untuk melihat jaringan produksi, distribusi dan konsumsi pangan. Namun peneliti tetap merasa perlu untuk menentukan suatu lokasi penelitian berdasarkan suatu kawasan administrasi tertentu. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa bagaimanapun juga perlu ada suatu tem-

pat untuk memulai prakarsa pembentukan sistem pangan lokal ini. Namun demikian ketika penelitian ini berlangsung peneliti tidak akan terlalu terkungkung oleh batasan administrasi tersebut dan tetap melihat bagaimana rangkaian jaringan produksi, distribusi dan konsumsi tersebut ada. Alasan lainnya adalah dalam konteks advokasi kebijakan, suatu kebijakan pangan akan diberlakukan di suatu kawasan administratif tertentu dan dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang ada di kawasan tersebut. Dilakukannya studi di suatu kawasan administratif memungkinkan dilakukannya advokasi terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Tahapan-tahapan pemilihan lokasi

Pertama yaitu pemilihan lokasi studi di tingkat Kabupaten. Pemilihan lokasi studi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kemungkinan uji coba sistem pangan lokal dapat dilakukan yang mensyaratkan adanya anggota KRKP yang mampu melakukan uji coba tersebut. Kriteria yang digunakan harus menunjukkan anggota KRKP yang cukup kuat, memiliki pengalaman pengorganisasian dan dengan demikian memiliki kelompok-kelompok dampingan petani di daerah tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipilihlah Kabupaten Klaten sebagai lokasi penelitan yang merupakan daerah dampingan dari Jarnop PP Klaten dan FKIP yang juga merupakan anggota KRKP.

Tahap berikutnya dilanjutkan dengan pemilihan kecamatan di kabupaten terpilih. Kecamatan ini dipilih berdasarkan diskusi dengan mitra lokal. Pemilihan wilayah ditentukan berdasarkan tiga hal. *Pertama,* mencerminkan perbandingan wilayah antara yang relatif terintegrasi dengan pasar dan yang tidak. *Kedua,* ada keragaman karakter pasar yang mencerminkan pertukaran komoditas pangan. *Ketiga,* mencerminkan perbedaan karakteristik lahan. Berdasarkan kriteria tersebut kecamatan yang dipilih adalah kecamatan Bayat dan Jatinom (**lihat Peta Orientasi**). Kecamatan Bayat adalah kecamatan yang tidak subur, mayoritas adalah daerah tegalan, relatif tidak terintegrasi dengan pasar sementara Kecamatan Jatinom

adalah daerah yang sebagian daerahnya subur, dan relatif lebih terintegrasi dengan pasar. Kecamatan Bayat, di dalam posisi di Kabupaten lebih dipandang untuk potensi pariwisata, sementara Jatinom adalah daerah yang diprioritaskan untuk menjadi kawasan pertumbuhan pertanian dan agrobisnis (lihat boks 1.2).

Boks 1.2
Sekilas Kecamatan Jatinom dan Bayat

Kecamatan Jatinom
Kecamatan Jatinom menjadi pintu gerbang yang menghubungkan Kabupaten Klaten dengan Boyolali. Sebagai gerbang penghubung, tidaklah mengherankan bila kecamatan ini ditunjang oleh berbagai fasilitas transportasi dan komunikasi yang cukup memadai seperti jalan beraspal, angkutan umum, pasar induk dan lainnya.

Secara umum, Kecamatan Jatinom terbagi menjadi dua kawasan, yaitu yang berada di lereng gunung Merapi dan yang berada di dataran rendah. Perbedaan ini sangat berpengaruh pada pola tanam dan jenis tanaman yang dibudidayakan di masing-masing kawasan. Kawasan dataran rendah secara geografis memang relatif sangat memungkinkan untuk memiliki saluran irigasi teknis. Sumber air yang mengaliri saluran irigasi tersebut berasal dari gunung Merapi. Dengan demikian tidaklah mengherankan bila banyak ditemukan kawasan yang membudidayakan padi selama tiga atau dua musim tanam dalam satu tahun di kawasan tersebut. Desa-desa yang ada di kawasan dataran adalah Desa Jemawan, Gedaren, Boyokan, Krajan, Puluhan dan Pandeyan serta Kelurahan Jatinom. Hasil produksi padi sawah irigasi teknis di kawasan Jatinom pada tahun 2002 mampu mencapai 51619,8 Kwintal dari total luas kawasan 963 Ha dengan demikian, rata-rata produksi kawasan Jarinom adalah 53,16 Kw/Ha.

Sementara itu, petani yang berada di kawasan lerang Gunung Merapi biasanya lebih banyak membudidayakan tanaman palawija. Tidak adanya saluran irigasi yang melintasi kawasan mereka, membuat petani di kawasan tersebut hanya mampu menanami lahannya dengan padi satu kali dalam setahun, yaitu pada musim penghujan. Bahkan, ada petani di beberapa desa yang sama sekali tidak menanami lahannya dengan padi karena berbagai alasan. Tanaman yang mendominasi kawasan ini adalah jagung dan ubi kayu yang sering kali disertai dengan tanaman kacang tanah, kacang panjang, serta cabai.

Potensi lainnya dari Kecamatan jatinom yang juga tidak kalah pentingnya adalah peternakan. Jumlah sapi perah jantan dewasa yang diternakan di Jatinom mampu mencapai 243 ekor sedangkan sapi jantan betinanya 1340 ekor. Bila dilihat secara total (sapi jantan/betina/dewasa/muda) pada tahun 2002 mampu mencapai 4092 ekor. Hewan lainnya yang juga banyak diternakkan oleh masyarakat Kecamatan Jatinom adalah sapi potong (dengan jumlah total 8710 ekor), kerbau (147 ekor) serta kambing yang mencapai 7982 ekor.

Kecamatan Bayat

Berbeda dengan Kec, Jatinom yang menjadi gerbang Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Boyolali, Kecamatan Bayat tidak menjadi gerbang utama Kebupaten Klaten dengan Provinsi Jogjakarta. Hal ini disebabkan karena Wilayah Provinsi Jogjakarta yang berbatasan dengan Kecamatan Bayat adalah gunung kidul.

Secara umum Kecamatan Bayat sendiri terbagi menjadi dua wilayah yaitu wilayah lereng gunung kapur di sebelah selatan dan wilayah dataran di sebelah utara. Secara umum, kawasan yang berada di lereng gunung kapur memang tidak terlalu ideal untuk dijadikan lahan pertanian. Pada bulan Agustus sampai November (musim kemarau) tanahnya retak sehingga tidak bisa ditanam sama sekali. Dengan demikian petani di kawasan tersebut hanya mampu menanami sawahnya dengan padi satu

tahun sekali dengan mengandalkan pada datangnya musim penghujan. Desa-desa yang ada di wilayah ini adalah Nengahan, Jarum, Dukuh, Ngerangan, Jambakan dan Tegalrejo. Sementara itu, di wilayah Bayat Utara kondisi georgafisnya cukup baik bagi pertanian. Di kawasan ini, ada beberapa desa yang mampu menanami sawahnya hingga tiga kali dalam setahun. Pola tanam yang biasa digunakan adalah padi-padi-palawija, meski ada pula yang menggunakan padi-palawija-palawija. Hal ini dimungkinkan karena wilayah ini dialiri oleh dua sumber air irigasi yaitu rojo jombor dan sungai dengkeng. Desa-desa yang berada di kawasan ini adalah Tawangrejo, Cawas, Wiro, Jotangan, Krikilan, Aseban dan Krakitan.

Lahan pertanian yang ada di Kecamatan Bayat didominasi oleh lahan kering (tegalan). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kec. Bayat, lahan irigasi teknis di Kec. Bayat hanya 167 ha dari 1579,2 Ha total lahan pertanian yang ada. Sementara itu kawasan tegalan mendominasi sistem pertanian di Kec. Bayat dengan area 761,2 Ha, hal ini masih ditambah dengan area sawah tadah hujan yang diperkirakan dapat menembus angka 437 ha (lihat Tabel 3.1). Begitu dominannya lahan kering di Kecamatan Bayat bukanlah sesuatu yang mengherankan karena memang sebagian wilayah Bayat berada di lereng gunung kapur (Gunung Kidul) yang tidak teraliri oleh irigasi.

Melihat guna lahan dan potensi yang dimiliki, tidak heran apabila produksi di Bayat yang terbesar adalah Jagung 4033 kwintal dan mencakup 696 Ha. Komoditi lain yang juga menjadi andalan Kecamatan Bayat adalah Kedelai. Potensi lainnya dari Kecamatan Bayat adalah peternakan rakyat. Di Bayat, cukup banyak terdapat peternakan unggas hal ini nampak dari tingginya jumlah jenis ternak ayam ras (25.950 ekor) yang terkonsentrasi terutama di Desa Beluk dan Krakitan.

Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah komuniti desa pertanian. Dipilihnya komuniti sebagai unit analisis didasarkan pada pemikiran bahwa kedaulatan petani dan upaya untuk memprakarsai pembentukan sistem pangan lokal memang tidak dapat diletakkan pada tingkat individu, melainkan pada tingkat komuniti. Di sini individu dilihat sebagai anggota komuniti yang bersangkutan, sedangkan komuniti itu yang terdiri dari berbagai aktor dan institusi mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi berikut jaringan-jaringan antara aktor dan institusi tersebut

Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan tujuan penelitian. Hal tersebut dilakukan agar peneliti tetap dapat memfokuskan penelitian pada tujuan penelitian dan tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Informan dipilih yang mewakili petani terutama petani marginal (petani pemilik lahan subsisten dan buruh tani) dan aktor yang mewakili jaringan produksi, distribusi dan konsumsi, sebagai berikut:

I. Produksi

- Petani, yang masih melakukan kegiatan pertanian, baik pemilik, penyakap, buruh tani, ataupun penyewa.
- Agen-agen produksi pertanian (toko sarana produksi pertanian termasuk pupuk organik, petugas penyuluh lapangan, Perkumpulan Petani Pengguna Air atau kelompok tani, dan lain-lain).

II. Distribusi

- Agen-agen distribusi ditingkat lokal dan ekstra lokal (bakul, penebas, pengepul)
- Institusi distribusi pertukaran komoditi ditingkat lokal dan ekstra lokal (pasar baik pasar di tingkat desa, kecamatan)

III. Konsumsi

- Agen-agen penyedia berbagai kebutuhan konsumsi komuniti (bakul, pedagang, lumbung desa)
- Konsumen

IV. Kebijakan

- Pemerintah dan pejabat terkait sebagai pihak yang mengeluarkan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Melalui pendekatan deskriptif, dikumpulkan data yang bersifat kualitatif yang diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang sedang terjadi secara luas dan mendalam mengenai beberapa hal seperti yang ditampilkan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan data

Topik Penelitian	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengum-pulan Data
Konteks Penelitian	A. Data geografi lokasi penelitian: topografi, batas kawasan, tata guna lahan. B. Data statistik situasi pangan: pendapatan domestik bruto, jenis produksi pangan, jenis produksi rumah tangga, serta keragaman pangan	Pejabat kecamatan dan desa, instansi terkait	Observasi, Data Sekunder
Produksi Pangan	Jalur-jalur produksi pangan (aktor/institusi dan mekanisme) di *input-input* produksi pangan (varietas, pola tanam, pupuk, pestisida) serta kteresediaan sarana produksi. Alasan	Petani, serta agen produksi pertanian	Wawancara Mendalam, Observasi,

	penentuan varietas, penggunaan pola tanam, pemilihan awal musim tanam. Penggunaan pupuk, pestisida dan benih, agen atau institusi yang terlibat dalam masing-masing tahapan, ketersediaan sarana produksi		
Distribusi Pangan	Metode pelepasan hasil panen, agen dan institusi yang terlibat dalam proses distribusi, serta relasi yang terjalin antar aktor.	Petani, serta agen distribusi pangan	Wawancara Mendalam, Observasi,
Konsumsi Pangan	Metode pemenuhan kebutuhan pangan baik di produsen maupun konsumen, pola makan, agen dan institusi yang terlibat dalam proses konsumsi, ketersediaan kebutuhan konsumsi	Petani, konsumen, serta agen konsumsi pangan	Wawancara Mendalam, Observasi,
Kebijakan	Jenis kebijakan dan program pertanian dan pangan kebijakan yang berdampak pada kedaulatan/ketidakd aulatan petani, dampak kebijakan tersebut bagi kedaulatan pangan masyarakat	Pejabat kecamatan dan desa, instansi terkait, petani	Wawancara Mendalam, Observasi, data Sekunder

Pada awalnya studi ini tidak dirancang dengan menggunakan perspektif gender dan melihat pembagian kerja pertanian berdasarkan gender. Namun fenomena di lapangan menunjukkan signikansi peran perempuan dalam membangun sistem pangan lokal. Dengan demikian, studi-studi berikutnya tentang sistem pangan lokal perlu memperhatikan mengenai pembagian kerja pertanian berdasarkan gender.

BAB 2
SITUASI PANGAN LOKAL

Ide pembentukan sistem pangan lokal pada awalnya dihadapkan pada suatu pertanyaan: di kawasan manakah sistem pangan lokal akan dilaksanakan? Apakah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau satuan teritori lainnya? Idealnya, sistem pangan lokal dimulai di suatu kawasan yang tidak semata didasarkan pada batas-batas administrasi tertentu (desa, kecamatan, kabupaten, dan sebagainya). **Penentuan lokasi berdasarkan pada batas-batas administrasi saja, akan memutus jaringan produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang secara nyata ada di masyarakat dan merupakan perhatian dari studi ini.**

Studi ini memperlihatkan bahwa pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan pangan suatu kawasan tertentu juga ditentukan oleh adanya asupan komoditi pangan yang berasal dari luar kawasan yang bersangkutan. Dalam studi ini, peneliti tidak menemukan suatu kawasan (administrasi) yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pangan terjalin dalam suatu jaringan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang melampaui batas-batas administratif suatu kawasan tertentu.

Untuk kasus Kecamatan Bayat dan Jatinom, studi ini menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan situasi pangan di antara keduanya. Gejala yang umum ditemukan baik di Kecamatan Bayat maupun Kecamatan Jatinom yaitu:

(1) Telah terbatasnya keragaman tanaman pangan baik di Jatinom maupun Bayat
(2) Tanaman pangan bukan lagi dimaknai sekedar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga semata (tanaman pangan untuk rumah tangga alias *food crop*), namun juga untuk diperdagangkan (tanaman pangan yang diperdagangkan alias *cash crop*). Di beberapa kawasan, pembudidayaan *cash crop* nampak lebih dominan daripada tanaman pangan.
(3) Petani-petani untuk jenis-jenis pangan untuk diperdagangkan ini memiliki ketergantungan yang lebih tinggi terutama ketergantungan pada berbagai asupan (benih, pupuk, dan pestisida) serta memiliki jalur distribusi panjang dan berbiaya tinggi yang tidak menguntungkan petani.

Temuan studi juga menunjukkan adanya berbagai perbedaan situasi pangan baik antar kecamatan maupun di dalam Kecamatan Jatinom dan Bayat itu tersendiri. Perbedaan situasi pangan ini menunjukkan bahwa (1) situasi pangan di suatu kawasan (lokalitas) tertentu berbeda dengan kawasan lainnya, (2) perbedaan tersebut lebih disebabkan karena kondisi geografis, aksesabilitas, ketersediaan sarana-prasarana serta social budaya masyarakat yang bersangkutan.

Beberapa corak situasi pangan yang diamati di wilayah studi adalah:

(1) Daerah-daerah yang tidak memiliki keragaman pangan karena mayoritas memproduksi tanaman *cash crop* seperti padi, kedelai. Hasil produksi pangan sepenuhnya dijual melalui perantara-perantara besar (yang tidak berasal di daerah tersebut) dan didistribusikan ke pasar-pasar di luar daerah yang telah sulit dilacak pasar akhirnya. Konsumsi pangan sendiri diperoleh dari luar dan sudah sulit diketahui dari mana produksi itu berasal.

(2) Daerah-daerah yang masih memiliki keragaman pangan. Jenis pangan yang diproduksi merupakan kombinasi antara jenis pangan *cash crop* dan kebutuhan konsumsi. Hasil produksi masih ada yang dijual melalui perantara-perantara dan pasar-pasar lokal dan didistribusikan ke desa-desa setempat. Walaupun produksi-produksi pangan di daerah ini sebagian diperjualbelikan dan dikomersilkan tetapi masih ada ruang-ruang untuk keterkaitan jaringan di tingkat lokal dan memenuhi sebagian konsumsi masyarakat di tingkat lokal.
(3) Daerah-daerah kering dan memiliki keterbatasan tinggi di dalam menghasilkan pangan. Jenis pangan yang diproduksi sebagian besar adalah jenis pangan untuk konsumsi. Produksi pangan yang dijual masih terbatas pada jenis-jenis pangan seperti kedelai, jagung dan ketela. Di daerah-daerah ini pangan tersebut masih banyak dijual untuk konsumsi di tingkat lokal. Di daerah ini juga masih banyak ditemukan pertukaran-pertukaran pangan secara lebih lokal dan tertutup.

Di daerah-daerah dengan corak situasi pangan kedua dan ketiga masih menunjukkan lebih banyak mekanisme-mekanisme pertukaran pangan berbasis "sosial" (horisontal) yang kemudian menjadi modal sosial sebagai mekanisme bertahan petani dan penduduk miskin di pedesaan. Sementara di tempat-tempat atau komoditi-komoditi pangan yang komersial, mekanisme pertukaran terjadi lewat perdagangan dan kolektifitas yang terbangun adalah kolektifitas vertikal yang terkait dengan jalur-jalur perekonomian.[2] Di daerah-daerah kedua dan ketiga pula, masih ditemukan ruang-ruang kebebasan petani untuk menentukan sendiri input dan pasarnya.

Di Kecamatan Jatinom lebih banyak ditemukan situasi pangan bercorak pertama terutama di daerah-daerah irigasi teknis (irtek), se-

2 Hal ini terkait dengan tesis utama Polanyi bahwa kapitalisme merupakan sebuah anomali sejarah karena sementara pengaturan-pengaturan ekonomi pada masa sebelumnya ditentukan didalam hubungan-hubungan sosial, maka di bawah kapitalisme situasinya menjadi terbalik hubungan sosial didefinisikan oleh hubungan-hubungan ekonomi.

mentara di sebagian daerah tegalan Jatinom bercorak kedua. Sementara itu di Kecamatan Bayat, corak situasi pangan kedua dan ketiga lebih kental. Kecamatan Bayat relatif masih memiliki banyak ruang-ruang kedaulatan bila dibandingkan dengan Kecamatan Jatinom. Berdasarkan kondisi tersebut, **peneliti merekomendasikan Kecamatan Bayat sebagai tempat yang memiliki mempunyai peluang terbesar di Kabupetan Klaten untuk menjadi lokasi prakarsa pembentukan sistem pangan lokal.**

Secara khusus situasi pangan lokal di kawasan penelitian dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan data

	JATINOM	BAYAT
PRODUKSI		
Penentuan awal musim tanam	Irtek : Tidak tergantung cuaca, namun lebih ditentukan oleh keuntungan ekonomi yang ingin didapatkan. Tegalan: Tergantung cuaca	Irtek : Tidak cergantung cuaca, namun lebih ditentukan oleh keuntungan ekonomi yang ingin didapatkan. Tegalan: Tergantung cuaca
Penentuan pola tanam	Irtek: Relatif ditentukan oleh capaian ekonomi yang ingin diraih Tegalan: ditentukan oleh capaian ekonomi yang ingin diraih dan	Irtek : selain ditentukan oleh capaian ekonomi, masih ada juga yang empertimbangkan faktor ekologis dan lingkungan Tegalan: ditentukan oleh capaian ekonomi yang ingin diraih dan

	pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga sehingga memunculkan keragaman pangan	pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga, sehingga memunculkan keragaman pangan
Penentuan varietas	Ditentukan oleh permintaan pasar dan diperuntukkan bagi pasar	Meskipun juga ditentukan pasar, masih ada varietas yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi lokal sehingga memunculkan keragaman pangan
Penentuan/ pembelian benih	Irtek: Sangat tergantung pada benih hibrida (terutama padi dan jagung) Tegalan: Ada yang menggunakan benih lokal, meski jumlahnya lebih banyak yang memakai benih hibrida	Irtek: Tergantung pada benih hibrida Tegalan: Masih cukup banyak yang menggunakan benih lokal
Penentuan/ pembelian pestisida	Irtek: Tergantung pada pestisida kimia, dan pemakaiannya pun relatif tinggi Tegalan: hanya bila terkena serangan hama atau sebagi tidakan pencegahan	Irtek: Menggunakan campuran pestisida kimia dan pestisida dari bahan alam. Tegalan: hampir tidak pernah menggunakan pestisida
Penentuan/ pembelian pupuk	Irtek: Tergantung pada penggunaan pupuk pabrikan (kimia dan organik), meskipun telah mampu membuat pupuk organik sendiri	Irtek: campuran pupuk kimia, dan pupuk kandang. Pupuk kandang berasal dari ternak sendiri dan dari desa setempat yang penduduknya mayoritas beternak (ternak rakyat).

	Tegalan: jarang memakai pupuk kimia, banyak menggunakan pupuk organik baik yang membeli ataupun membuat sendiri	Tegalan: Lebih suka menggunakan pupuk organik (pupuk kandang) hasil dari ternak sendiri, sehingga tidak perlu membeli atau diperoleh melalui pertukaran dengan peternak dari desa sekitar.
DISTRIBUSI		
Penentuan pembeli hasil panen	Lebih suka menggunakan sistem tebasan yang mengakibatkan petani tidak memiliki akses dan kontrol terhadap hasil panennya. Akibatnya hasil panen lebih banyak beredar ke luar kawasan peneltian. Penebas sendiri kebanyakan berasal dari luar daerah setempat.	Meskipun ada yang menggunakan sistem tebasan, masih banyak pula petani yang memperuntukan hasil panennya bagi konsumsi rumah tangganya (disimpan dalam bentuk gabah) atau langsung mendistribusikannya di kawasan tempat dia tinggal melalui media-media pertukaran yang memungkinkan distribusi di lokal setempat (misal melalui pasar-pasar kecil, bakul-bakul setempat, industri-industri rumah tangga pengolah pangan).
KONSUMSI		
Pola konsumsi	Relatif cukup tergantung pada pasar	Masih banyak petani yang mengolah hasil panennya untuk konsumsi rumah tangga petani yang bersangkutan serta masih ada industri

		pengolahan pangan lokal.
MEKANISME SOSIAL		
Pertukaran dan redistribusi pangan	Mekanisme sosial pertukaran dan redistribusi ditingkat petani sudah mulai memudar	Mekanisme sosial masih cukup banyak terjadi, baik dibidang pertanian seperti pada pengadaan benih, pupuk, serta pada tahapan kegiatan produksi.
AKTOR		
Inividu atau institusi yang berperan dalam kegiatan pangan	Kegiatan pertanian di kawasan penelitian sudah banyak didominasi oleh aktor dari luar kawasan penelitian, baik di bidang produksi, distribusi maupun konsumsi. Hal ini menyebabkan ruang bagi aktor lokal untuk ikut berperan sudah semakin kecil	Masih banyak aktor lokal yang berperan dalam sistem pertanian di kawasan penelitian.
KEBIJAKAN		
	Kebijakan anggurisasi yang mengancam keragaman pangan di Jatinom, Gedaren, dan daerah sekitarnya	Rowo Jombor yang menyebabkan turunnya debet air bagi petani yang airnya berasal dari rowo jombor. Rencana pengembangan Rowo Jombor yang dikhawatirkan menyebabkan konversi lahan pertanian ke non

		pertanian sekaligus mengancam sumber daya air bagi pertanian.

Pemilihan Kecamatan Bayat sebagai tempat pelaksanaan prakarsa pembentukan sistem pangan lokal di Kabupaten Klaten didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki beberapa kelebihan/kekuatan di antaranya:

- Adanya keragaman pangan, dan jenis tanaman pangan yang diperuntukkan bagi konsumsi rumah tangga.
- Tingkat ketergantungan pada asupan luar (pabrikan) seperti pupuk kimia dan benih yang relatif rendah
- Adanya mekanisme sosial pertukaran di antara anggota komuniti
- Telah terjadi jaringan pertukaran antara produsen panganan di tingkat lokal dengan konsumen yang juga merupakan anggota komuniti yang bersangkutan
- Adanya potensi kesadaran pentingnya pengorganisasian diri di masyarakat
- Adanya mekanisme, institusi dan agen distribusi di tingkat lokal
- Adanya industri pangan di tingkat lokal yang bahan bakunya berasal dari kawasan tersebut dan masih didistribusikan di tingkat lokal pula

Meskipun demikian, studi ini juga menangkap adanya beberapa kelemahan di kawasan tersebut. Pengetahuan tentang kelemahan ini menjadi penting bagi strategi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkannya. Beberapa kelemahan yang sempat terungkap dalam studi adalah:

- Kekuatan-kekuatan tersebut seperti menjaga keragaman pangan, tidak tergantung pada asupan luar, serta distribusi pangan di tingkat lokal, belum /bukan dilakukan atas dasar kesadaran perlunya mengurangi tingkat ketergantungan, namun lebih karena keterpaksaan dan strategi adaptasi mereka terhadap lingkungan

- Adanya ketergantungan pada produk yang tidak banyak diproduksi di kawasan tersebut, tapi justru merupakan kebutuhan pokok, dalam hal ini beras
- Adanya ketergantungan pada berbagai komoditi pangan produksi nonlokal (pabrikan)

Hal yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah adanya ancaman yang muncul yang dapat mengganggu prakarsa pembentukan sistem pangan lokal. Ancaman tersbut biasanya berasal dari luar komuniti yang bersangkutan, di antaranya adalah:

- Kebijakan/program/kampanye yang menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian serta alih komoditi tanaman pangan ke jenis tanaman yang berorientasi pada pasar
- Karena praktek pertanian dilakukan atas bukan atas dasar kesadaran, maka praktik-praktik tersebut menjadi cukup rentan terhadap intervensi dari berbagai pihak
- Masuknya agen-agen produksi, distribusi yang dapat mengancam kekuatan yang telah mereka miliki baik di segi produksi, distribusi ataupun konsumsi

BAB 3
REKOMENDASI

Sebagai suatu studi yang dirancang untuk aksi, studi ini dituntut untuk mampu menghasilkan beberapa rekomendasi aksi yang dapat digunakan untuk mewujudkan kedaulatan pangan seperti yang telah cita-citakan. Rekomendasi tersebut dibuat sebagai langkah awal untuk memprakarsai pembentukan sistem pangan lokal di kawasan yang bersangkutan. Secara umum peneliti memberikan dua rekomendasi. Rekomendasi pertama ditujukan bagi kawasan yang menjadi lokasi penelitian. Seperti yang telah disebutkan di atas, studi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Bayat merupakan kawasan yang memiliki ruang kedaulatan paling besar dan tingkat ketergantungan yang paling kecil bila dibandingkan dengan Kecamatan Jatinom. Dengan demikian rekomendasi yang muncul pada bagian ini memang khusus bagi Kecamatan Bayat yang peneliti anggap sebagai kawasan yang paling *feasible* untuk prakarsa pembentukan sisten pangan lokal di Kebupaten Klaten.

Rekomendasi kedua lebih bersifat umum, bila prakarsa pembentukan sistem pangan lokal hendak dilakukan di luar kawasan penelitian. Pertanyaan pertama yang muncul adalah dalam situasi apa prakarsa pembentukan sistem pangan lokal mungkin untuk diwujudkan? Pertanyaan tersebut mengandung arti apa saja prasyarat yang perlu ada di suatu kawasan bila prakarsa pembentukan sistem

pangan lokal hendak dilakukan di kawasan tersebut. Hal ini penting bagi petani, NGO, Organisasi Tani, Pemerintah atau siapapun yang ingin memprakarsai pembentukan sistem pangan lokal di kawasan lain di luar kawasan penelitian.

REKOMENDASI BAGI KECAMATAN BAYAT

Seperti yang telah dipaparkan dalam subbab 1.2 ada sejumlah 'syarat ideal' yang perlu dipenuhi agar sistem pangan lokal dapat tercapai. Pada kenyataannya tidak semua syarat ideal itu tersedia di Kecamatan Bayat, dan ada beberapa hal yang dapat mengancam keberadaan syarat-syarat ideal tersebut. Rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat beberapa syarat yang telah ada, mengembangkan syarat yang kondisinya belum terlalu ideal serta berusaha mengurangi atau bahkan menghilangkan faktor-faktor yang mengancam syarat tersebut pada khususnya serta kedaulatan pangan pada umumnya.

Persiapan Prakarsa Pelaksanaan Sistem Pangan Lokal

Lokakarya

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan lokakarya di kawasan yang telah terpilih menjadi lokasi tempat pelaksanaan prakarsa pembentukan sistem pangan lokal akan dilakukan (dalam hal ini Kecamatan Bayat). Lokakarya ini sebaiknya dihadiri oleh semua pihak yang berperan dalam sistem pangan lokal di kawasan tersebut, mulai dari petani sebagai produsen pangan, aktor-aktor distribusi pangan, pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga pendamping petani, organisasi tani dan sebagainya. Ada beberapa sasaran yang ingin diraih dalam kegiatan ini yaitu:

(1) Sebagai ajang untuk mengenalkan ide prakarsa pembentukan sistem pangan lokal pada semua pihak yang berkepentingan, terutama petani dan anggota komuniti desa.

(2) Sebagai jalan masuk (*entry point*) bagi pelaksanaan prakarsa pembentukan sistem pangan lokal di kawasan tersebut.
(3) Menjajaki dan mendeteksi bagaimana petani dan anggota komuniti desa memahami dan menanggapi prakarsa pembentukan sistem pangan lokal.
(4) Membuat kesepakatan mengenai perlu atau tidaknya dilakukan prakarsa pembentukan sistem pangan lokal di kawasan tersebut.

Putaran Diskusi

Putaran diskusi dengan masyarakat setempat perlu dilakukan bila pada lokakarya telah tercapai suatu kesepakatan bahwa prakarsa sistem pangan lokal memang akan dilakukan di kawasan tersebut. Putaran diskusi tersebut dilakukan **di beberapa komuniti (desa) tempat pembentukan sistem pangan lokal**. Tujuannya untuk melibatkan semua pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan prakarsa pembentukan sistem pangan lokal. Secara lebih spesifik, tujuan dilaksanakannya putaran diskusi ini adalah: ***Pertama, m***emperkaya dan menggali data tambahan sekaligus menjadi alat konfirmasi atas temuan lapangan. ***Kedua,*** menjajagi dan mendeteksi bagaimana petani memahami dan menanggapi prakarsa pembentukan sistem pangan lokal. ***Ketiga,*** melihat *feasibility* rekomendasi yang telah dihasilkan oleh peneliti. *Keempat,* mendeteksi hal-hal apa saja yang menurut petani paling mungkin untuk dapat dilakukan..

Hal yang diperlukan: Membuat suatu panduan untuk melaksanakan putaran diskusi tersebut

Rekomendasi Prakarsa Pembentukan Sistem Pangan Lokal

Apa yang Perlu Dilakukan di Bidang Produksi?

1. Memperkuat dan menjaga potensi keragaman pangan
   Keragaman jenis pangan akan penting untuk mengurangi kerentanan dan ketergantungan suatu komuniti terhadap produk-

produk atau aktor distributor dari kawasan lain. Adanya tingkat keragaman tanaman pangan yang cukup tinggi di suatu kawasan tertentu merupakan suatu potensi pemenuhan kebutuhan yang relatif dapat mereka akses, kendalikan dan dipertukarkan sendiri.

Peluang:

a) Keragaman pangan sudah ada, terutama di kawasan tegalan yang menggunakan pola tanam kombinasi antara tumpang sari dan tumpang gilir.
b) Adanya optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Optimalisasi lahan pekarangan ini juga sangat menonjol pada kawasan tegalan.

Rekomendasi:

a) Mengamati dan mengadvokasi program yang telah disebutkan di atas, yang dapat memunculkan berbahaya mengancam keragaman dan kedaulatan petani, dengan demikian perlu:
   - Mencegah intervensi program-program reboisasi yang menggunakan benih extra lokal. Perlu dipelajari lebih lanjut program tersebut karena ada kemungkinan program tersebut mengalihkan penggunaan lahan pertanian (termasuk keragaman) dari tegalan dan sebagainya, menjadi hutan dan sebagainya, serta penggunaan lahan rakyat untuk reboisasi.
   - Mencegah dan mengadvokasi program yang akan mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi nonpertanian. Serta pengurangan keragaman yang akan terjadi apabila rencana pengembangan Wisata Rowo Jombor di Kecamatan Bayat itu jadi dilakukan.

b) Melakukan kegiatan penguatan pada aktor yang berpotensi menjaga keragaman pangan.

Hal yang diperlukan:

a) Data mengenai aktor yang menentukan dan siapa yang mengurus sumber pangan yang ada di tegalan maupun di pekarangan.
b) Data mengenai aktor utama yang terlibat dalam kebijakan.

2. Mendorong terciptanya pengelolaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi lokal

Ide awal yang mendasari rekomendasi ini adalah menciptakan mata rantai antara produksi hasil pertanian dan nonpertanian melalui industri pengolah hasil pertanian. Jenis industri pengolah pangan yang sebaiknya didorong adalah industri-industri skala mikro (rumah tangga) dan kecil. Ada beberapa alasan yang melandasi pentingnya untuk mendorong industri-industri pengelolaan pangan skala kecil dan mikro adalah:

- Industri pengolah hasil pertanian di tingkat rumah tangga akan mendorong (sebagian) distribusi hasil produksi pertanian terjadi di tingkat lokal. Industri-industri skala rumah tangga adalah industri berskala kecil, dengan volume produksi yang kecil. Sehingga kebutuhan akan asupan tidak terlampau besar, maka biasanya mereka membeli asupan langsung dari petani dan tidak melalui tengkulak-tengkulak besar.
- Menurunkan biaya transaksi. Karena distribusi terjadi di tingkat lokal, maka sistem distribusi yang terjadi akan menurunkan biaya transaksi karena tidak banyak melibatkan aktor-aktor perantara (seperti pengepul, tengkulak). Dengan demikian nilai tambah akan terdistribusi di tingkat lokal.
- Pertukaran (baik melalui perdagangan maupun sosial) yang terjadi di tingkat lokal menjadi potensi awal untuk mendorong solidaritas dan kolektivitas yang penting untuk pengorganisasian.

Peluang:

Mekanisme interaksi sudah terjadi dan menimbulkan ikatan antara pembeli (industri rumah tangga) dengan petani.

Rekomendasi:

a) Advokasi kesadaran bahwa menjual kepada industri pengolah pangan akan penting bagi kehidupan mereka. Mencegah proses investasi melalui jalur perdagangan seperti tengkulak akan sulit. Dengan demikian, proses yang bisa dilakukan adalah advokasi di sisi petani untuk memberikan kesadaran bahwa menjual kepada industri rumah tangga merupakan bagian dari upaya menjamin keberlangsungan kehidupan mereka.
b) Advokasi lain adalah upaya-upaya untuk memberikan penguatan bagi industri mikro dan kecil pengolah pangan. Sebagian besar adalah kelompok ibu-ibu. Penguatan yang dilakukan adalah upaya untuk mengurangi persoalan-persoalan yang dihadapi. Salah satu persoalan yang sering kali disebut adalah modal, dan seringkali upaya penguatan ditujukan untuk memberikan modal (*income generating type of project*). Dilemanya adalah kekurangan modal menjadi faktor yang menguatkan distribusi lokal. Walaupun demikian, salah satu bentuk penguatan yang bisa dilakukan adalah mengurangi kerentanan usaha mikro. Kerentanan itu biasanya terjadi karena didalam usaha rumah tangga sistem keuangan menjadi satu antara keuangan rumah tangga dan usahanya, misalnya ketika sesuatu terjadi di dalam keluarganya biasanya modal usaha terpakai. Salah satu bentuk penguatan yang bisa dilakukan adalah memberikan mekanisme jaminan sosial bagi ibu-ibu tersebut.

Hal yang diperlukan:

Perlu bekerjasama dengan LSM/ornop penguatan perempuan pengusaha mikro dan pengolah pangan. Kerjsama ini dilakukan untuk mengenali bahwa kerja-kerja yang dilakukan oleh ornop yang bergerak di pendampingan petani (untuk tujuan sistem pangan lokal) sebetulnya terkait dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh ornop pendamping perempuan usaha mikro. Kerjasama ini juga dilakukan dalam rangka mendapatkan pema-

haman yang lebih mendalam mengenai persoalan-persoalan dan kerentanan yang dimiliki oleh perempuan di usaha tersebut.

3. Memperkuat usaha lokal yang menjadi bagian penting dari mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lokal
   Senada dengan ide sebelumnya, maka ide yang muncul adalah meningkatkan mata rantai dari mulai produksi sampai konsumsi di tingkat lokal. Ide dasarnya adalah mencari asupan apa yang bisa menjadi output pada mata rantai pangan di satu lokalitas. Bagaimana mengenali usaha-usaha lokal yang penting? Adalah usaha-usaha yang 1) asupannya berasal dari produksi (petani) setempat 2) yang outputnya menjadi asupan bagi petani setempat. Di luar industri pengolah pangan yang asupannya adalah *output* dari petani, maka perhatian juga diberikan kepada usaha-usaha yang *output*-nya penting bagi petani. Sebagai contoh di wilayah studi adalah produksi jagung menjadi asupan bagi peternak ayam, demikian pula kotoran ternak menjadi asupan produksi jagung.

   Peluang:
   Peternakan-peternakan yang ada sebagian besar adalah peternakan-peternakan rakyat. Mereka memiliki potensi kekuatan kolektif yang dibuktikan dengan kemampuan mencegah industri ternak, dan melakukan advokasi kepada Dinas Peternakan untuk mengatasi flu burung.

   Rekomendasi:
   a) Advokasi untuk keragaman jenis jagung
   b) Lumbung Pangan.
      Di Bayat keberadaan lumbung ini, masih dapat dijumpai di beberapa desa contohnya di Desa Talang, Wiro dan Jambakan. Hanya saja lumbung yang ada di kawasan tersebut bukanlah lumbung pada tingkat desa, namun pada tingkatan dukuh. Lumbung tersebut didirikan atas dasar kesadaran

warga dan bukan diinisiasi oleh pemerintah. Sejauh ini, lumbung tersebut memang baru ada untuk komoditi beras /gabah, namun inisiatif warga masyarakat untuk mendirikan lumbung merupakan suatu potensi yang sangat baik, bukan hanya bagi pendirian lumbung serupa untuk komoditi yang berbeda (jagung dan panganan pokok lainnya atau bahkan berbagai asupan produksi seperti benih, pupuk dan pestisida), namun juga bagi pengorganisasian warga. Di kawasan penelitian, keberadan lumbung tersebut memang masih terfokus pada fungsinya sebagai lembaga simpan-pinjam, namun demikian bukan berarti keberadaannya tidak dapat dikembangkan lebih luas lagi.

c) Advokasi untuk terus menggunakan pupuk kandang.

Mekanisme penggunaan pupuk kandang tidak hanya sekedar upaya penggunaan pupuk untuk memperkecil biaya dan menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Penggunaan pupuk kandang telah menciptakan mekanisme sosial melalui pertukaran langsung—tidak melalui perdagangan dan uang kontan—yang penting sebagai alat pertahanan petani. Mekanisme sosial hanya akan terjadi apabila terjaga interaksi antar petani.

Interaksi akibat pupuk kandang dimungkinkan terus terjadi karena petani yang tidak memiliki ternak bisa meminta kepada yang memiliki ternak dan kemudian memberikan sebagian kecil hasil panennya. Atau karena petani jagung memasarkan jagungnya kepada peternak maka dia juga bisa memperoleh pupuk dari peternak tersebut dengan harga yang lebih murah (gratis). Dari penggunaan pupuk dan saling tukar menukar pupuk, ada pertukaran pangan yang terjadi. Pembelian pupuk langsung ke toko akan menghilangkan mekanisme sosial dan kerjasama antara petani, atau antara petani dan non tani.

Hal yang diperlukan:

Informasi mengenai lumbung jagung.

Apa yang Perlu Dilakukan di Bidang Distribusi

Penguatan aktor-aktor yang berperan di dalam distribusi lokal. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, aktor-aktor yang berperan dalam distribusi lokal adalah bakul-bakul perempuan, kemudian ada institusi-institusi yang berperan seperti pasar dadakan.

Peluang:

Potensi pengorganisasian di tingkat distribusi yang ditunjukkan dengan 1) para bakul sendiri sebetulnya telah memiliki mekanisme pengorganisasian untuk mengatur jadwal dan area berjualan 2) bentukan-bentukan kolektifitas untuk membuat mekanisme tabungan, simpan pinjam (tanpa bunga), dana sosial (pendidikan dan kebakaran).

Rekomendasi:

Pengorganisasian aktor-aktor tersebut dan menguatkan untuk mengurangi kerentanan yang mereka miliki dengan membuat mekanisme tabungan, simpan pinjam dan dana sosial. Hal apa yang perlu diketahui: persoalan dan insentif sehingga mereka menjual pangan lokal. Pengikat apa yang membuat mereka menjual pangan lokal dan didistribusikan di tingkat lokal.

Apa yang Perlu Dilakukan di Bidang Konsumsi?

1. Mengurangi ketergantungan terhadap berbagai komoditi non-lokal

   Bagaimana strategi mengurangi ketergantungan komuniti terhadap berbagai komoditi pangan non lokal (terutama pabrikan). Terlebih lagi dengan semakin maraknya berbagai produk panganan pabrikan (mie instan, kudapan, permen) yang kini telah merambah hingga ke perdesaan yang terpencil sekalipun

   Peluang:

   Adanya beragam kudapan (*snack*) lokal (keripik dan kacang).

Rekomendasi:
Mendorong timbulnya kesadaran akan arti positif dari makanan yang telah mereka konsumsi sekarang. Walaupun saat ini, hal tersebut terjadi karena keterpaksaan dan tidak memiliki uang untuk membeli produk-produk pangan extra-lokal.

Hal apa yang perlu dilakukan:
Kerjasama dengan lembaga-lembaga atau ornop yang bergerak di bidang kesehatan, penyaluran bantuan pangan dan sebagainya. Kerja-sama ini lebih dimaksudkan untuk membuat supaya segala jenis bantuan pangan diperoleh dari potensi lokal.

2. Memenuhi kebutuhan pangan akan beras untuk daerah-daerah tegalan
Bagian-bagian sebelumnya telah banyak membahas mengenai peluang-peluang membangun sistem pangan lokal yang nampaknya akan difokuskan di daerah tegalan. Walaupun demikian, di daerah tegalan terdapat persoalan kekurangan bahan pangan beras. Persoalan yang akan dihadapi di daerah tegalan untuk membangun sistem pangan lokal adalah pemenuhan kebutuhan mereka akan beras. Bagaimana memenuhi kebutuhan mereka akan beras?

Peluang:
Terlepas dari persoalan tersebut, di kawasan sentra beras tersebut masih terdapat ruang-ruang kedaulatan petani di jalur distribusi beras. Peluang tersebut masih dimungkinkan melalui pengembangan jalur distribusi beras yang memungkinkan pertukaran antar rakyat (di tingkat lokal) melalui aktor/institusi *selepan* (penggilingan padi). Namun tidak semua *selepan* berpotensi untuk membangun sistem pangan lokal, tetapi hanya pada beberapa *selepan* memiliki karakteristik yang berfungsi melayani kebutuhan penduduk setempat. *Selepan* memiliki fungsi tidak hanya menjadi penjual gabah petani baik sekitar (dan juga daerah lain) tetapi juga menjualkan gabah ke daerah-daerah di

sekitar. Beberapa *selepan* di daerah Wiro dan daerah Cawas (yang berbatasan dengan Bayat) sebagian berasnya berasal dari petani setempat dan juga sebagian berasnya masih ada yang dijual untuk konsumsi setempat.

Rekomendasi:

a) *Selepan* yang dapat diadvokasi adalah *selepan* yang berfungsi juga menjual beras ke komuniti setempat dan pemiliknya berasal dari daerah tersebut. *Selepan* ini biasanya menjadi tempat petani untuk menjual beras dalam bentuk gabah (tidak melalui sistem tebasan). Tujuan advokasi kepada *selepan* supaya *selepan* ini bisa membeli gabah dengan harga relatif lebih tinggi kepada petani dan kemudian menjual secara eceran dengan harga lebih reltif lebih rendah kepada konsumen. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya biaya transportasi.
b) Kemungkinan lain yang bisa dilakukan adalah advokasi petani untuk lebih menyimpan beras dalam sistem gabah dibanding sistem tebasan. Sistem penyimpanan dalam bentuk gabah kering lebih memungkinkan ruang-ruang kedaulatan dimana petani memiliki akses terhadap pangannya sendiri sekaligus membuka kemungkinan untuk melakukan mekanisme pertukaran di tingkat lokal.

Hal apa yang harus dilakukan:

Ide dasar yang akan dibangun adalah membuat mekanisme pertukaran (baik melalui pertukaran ekonomi maupun sosial) antara daerah (komunitas) sekitar (terdekat) yang menghasilkan dan memiliki surplus beras dengan daerah tegalan tersebut.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan pertukaran tersebut:

1) Mengidentifikasi wilayah atau daerah (terdekat) yang memiliki surplus beras atau setidaknya adalah daerah penghasil padi. Biasanya adalah daerah irigasi teknis.

2) Mengidentifikasi jalur distribusi beras di daerah tersebut dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
3) Pusatkan perhatian kepada jalur distribusi beras yang memungkinkan pertukaran antar komunitas di tingkat lokal. Pelajari aktor-aktor yang berperan di dalamnya serta insentif dan disinsentif apa yang diterima oleh aktor tersebut. Apakah dia mau membuat jalur perdagangan di tingkat lokal.

3. Penguatan Sektor Informal Perkotaan
   Studi ini memperlihatkan bahwa di daerah-daerah kering, sebagian besar penduduknya (terutama laki-laki) pergi merantau menjadi sektor informal. Misalnya di Bayat selatan, sebagian besar penduduknya pergi *mboro* (merantau), masuk ke sektor-sektor informal perkotaan dengan menjadi pedagang angkringan, es dan becak di kota-kota besar terutama di kota Yogyakarta. Yang menjalankan pertanian dan perekonomian adalah kelompok-kelompok perempuan; baik di pertanian maupun batik.

   Idenya adalah untuk menjalankan sistem pangan lokal, perlu adanya suntikan dana cash dan itu diperoleh selain dari (pengolahan pangan), usaha batik, juga dari sektor-sektor informal. Keberadaan sektor informal sebetulnya memberikan peranan bagi pengembangan sistem pangan lokal di pedesaan selama usaha-usaha yang berkembang adalah usaha-usaha yang mendukung jalur produksi, distribusi dan konsumsi di tingkat lokal

REKOMENDASI UMUM

Perlunya Pengetahuan Tentang Situasi Pangan Lokal

Rekomendasi ini terdiri dari hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan bila hendak memprakarsai pembentukan sistem pangan lokal di kawasan lain, di luar kawasan penelitian. Seperti yang telah disebutkan di atas, memprakarsai pembentukan sistem pangan lokal

di era globalisasi seperti sekarang ini jelas bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Karenanya prakarsa ini harus dimulai di kawasan yang relatif masih memiliki ruang-ruang kedaulatan yang cukup besar dalam sektor pangan mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi.

Salah satu cara untuk memetakan ruang ruang kedaulatan yang ada di kawasan tersebut dan juga untuk mengetahui bagaimanakah tingkat ketergantungannya adalah dengan melakukan riset untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi pangan lokal di kawasan tersebut. Meski studi ini telah merekomendasikan kawasan tegalan (Kecamatan Bayat, Kabupetan Klaten) sebagai kawasan yang memiliki ruang kedaulatan terbesar, namun bukan berarti hasil rekomendasi studi ini dapat begitu saja diduplikasikan di tempat lain yang berkarakter mirip dengan Kecamatan Bayat. Sebuah riset perlu dilakukan karena setiap kawasan biasanya memiliki situasi pangan lokal yang berbeda dangan kawasan lainnya, baik dari sistem, aktor maupun kebijakan yang ada di kawasan yang bersangkutan.

Situasi pangan lokal dapat dipetakan dengan melakukan studi mengenai:

1. Pola produksi, distribusi dan konsumsi pangan masyarakat.
2. Jaringan produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang ada di masyarakat tersebut.
3. Aktor-aktor dan institusi apa saja yang memiliki peran siginifikan dalam masing-masing kegiatan tersebut.
4. Kebijakan pangan atau kebijakan lain yang berdampak pada kedaulatan petani akan pangan.

Studi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai metode sepanjang masih dapat menjaring dan memetakan segala informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, petani. Organisasi pendamping petani atau siapapun yang ingin memprakarsai pembentukan sistem

pangan lokal dapat melakukan studi tersebut sesuai dengan kemampuan mereka.

Hal yang perlu dilakukan:
Membuat panduan untuk melaksanakan riset pemetaan situasi pangan lokal.

Dalam Situasi Apa Prakarsa Pembentukan Sistem Pangan Lokal Mungkin Diwujudkan?

Meski masih sangat terbuka untuk diperdebatkan—karena seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa setiap kawasan mempunyai ciri dan karakteristik situasi pangan lokal yang belum tentu sama dengan kawasan lainnya—namun studi ini menunjukkan beberapa ruang-ruang kedaulatan baik dari produksi, distribusi maupun konsumsi pangan yang memiliki peran signifikan dalam prakarsa pembentukan sistem pangan lokal. Secara umum, ruang-ruang kedaulatan tersebut dapat menjadi prasyarat bagi prakarsa pembentukan sistem pangan lokal.

Ruang Kedaulatan Produksi

Sistem produksi yang digunakan oleh masyarakat di suatu kawasan tertentu dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah kondisi geografis kawasan tersebut, tinggi-rendahnya permintaan pasar, ketersediaan sarana produksi, kebiasaan dan keterampilan masyarakat sekitar dan sebagainya. Dengan kata lain, apa beberapa hal yang memang masih memiliki potensi untuk diubah atau dikembangkan seperti kebiasaan dan keterampilan membudidayakan komoditas tertentu, dan ketersediaan sarana produksi. Namun ada pula yang cenderung bersifat *given* seperti kondisi geografis. Dalam konteks sistem pangan lokal, apapun penyebabnya, apakah itu sesuatu yang masih dapat diubah ataupun tidak, tetap mendapatkan perhatian yang sama besarnya, selama hal tersebut dapat mempertahankan dan mengambangkan ruang-ruang kedaulatan petani.

(1) Adanya Keragaman Tanaman Pangan Di Kawasan Tersebut

Keragaman jenis pangan yang dibudidayakan di suatu kawasan tertentu akan penting untuk mengurangi kerentanan dan ketergantungan suatu komunitas terhadap produk-produk atau aktor distributor dari kawasan lain. Tingkat keragaman tanaman pangan yang cukup tinggi di suatu kawasan tertentu merupakan suatu potensi pemenuhan kebutuhan yang relatif dapat mereka akses, kendalikan dan dipertukarkan sendiri. Dengan kata lain kawasan yang relatif masih memiliki ruang kedaulatan adalah kawasan yang *multikultur*.

Pada kawasan itu, tingkat keragaman tanaman pangan yang dibudidayakan relatif cukup tinggi, bagi mulai dari tanaman penghasil karbohodrat, sayuran, buah-buahan, hingga berbagai tanaman bumbu dapur. Keragaman pangan juga dimungkinkan melalui penggunaan lahan pekarangan yang lebih optimal. Tingginya tingkat produksi keragaman pangan keragaman pangan salah satunya disebabkan adanya pola tanam yang memungkinkan munculnya keragaman tersebut. Pola tanam yang memungkin memunculkan keragaman pangan adalah kombinasi antara pola tanam tumpangsari dan tumpanggilir.

(2) Adanya Penggunaan Asupan Produksi yang Bersifat Lokal

Penggunaan asupan lokal seperti benih lokal dan pupuk organik (kandang) dalam sistem produksi pertanian menunjukkan bahwa di tengah derasnya intervensi pasar untuk menggunakan berbagai benih dan pupuk non lokal (baca: pabrikan baik organik ataupun kimia), petani masih memiliki ruang-ruang kedaulatan untuk menentukan sendiri asupan produksinya dan tidak terlalu tergantung pada asupan pabrikan tersebut.

Dalam hal asupan produksi (contohnya penggunaan pupuk), ruang kedaulatan ditunjukan dengan adanya kecenderungan untuk menggunakan pupuk organik yang diproduksi di tingkat lokal. Hal ini perlu ditunjang dengan tersedianya ternak yang

cukup memadai yang menjadi sumber pembuatan pupuk tersebut. Hal yang harus diwaspadai bahwa kini telah banyak beredar pupuk organik yang diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu. Penggunaan pupuk organik pabrikan tersebut pada dasarnya merupakan suatu bentuk baru ketergantungan pada pasar karena petani pada akhirnya tetap terpaksa mengakses pasar (membeli) untuk mendapatkan pupuk organiki tersebut.

Penggunaan pupuk organik lokal juga perlu ditunjang dengan adanya mekanisme sosial pertukaran di antara anggota komuniti yang bersangkutan. Dengan mekanisme tersebut seringkali petani yang kebetulan tidak memiliki persediaan kotoran ternak atau benih, meminta atau meminjam dari tetangganya yang kebetulan memiliki persediaan berlebih. Mekanisme sosial seperti ini menjadi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan petani pada ketersediaan uang kontan (sebagai imbal jasa atas pertukaran yang dilakukan). Selain itu, adanya mekanisme sosial tersebut juga menunjukkan bahwa komuniti yang bersangkutan memiliki potensi pengorganisasian yang cukup menjanjikan. Bagaimanapun juga kedaulatan petani tetap harus diletakan dalam konteks komuniti, bukan individu.

Ruang Kedaulatan Distribusi

Distribusi merupakan suatu proses penyampaian komoditi dari produsen ke konsumen. Pembahasan mengenai distribusi komoditi pangan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pasar sebagai suatu institusi dan tempat terjadinya pertukaran antara produsen, dan konsumen. Dalam konteks sistem pangan lokal, pasar tidak hanya diartikan sebagai suatu tempat terjadinya transaksi antara pembeli dengan pedagang (*marketplace*) namun pasar sebagai suatu institusi pertukaran (*market*). Dengan demikian pasar yang diperuntukkan bagi pertukaran di tingkat lokal tidak lah harus berbentuk suatu *marketplace*, yang memiliki suatu lokasi yang ajeg dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pembedaan ini menjadi penting agar kita tidak hanya memfokuskan perhatian pada proses

pertukaran yang terjadi di suatu tempat pertukaran yang ajeg (*marketplace*) namun justru pada institusi pertukaran komoditi (baik secara fisik ataupun sosial) yang terjadi antara produser dan konsumen.

1. Institusi Pasar Melayani Komuniti di Sekitar Pasar Tersebut
   Prakarsa pembentukan sistem pangan lokal akan lebih mudah diwujudkan bila dilaksanakan di kawasan yang masih memiliki institusi pasar yang keberadaannya lebih untuk melayani kebutuhan komuniti yang ada di sekitar kawasan tersebut. Adanya institusi tersebut bukan hanya membuat masyarakat yang tinggal di sekitar pasar tersebut memiliki mengakses dan mengkontrol komoditi pangannya, juga dapat menjadi potensi pertukaran sosial di antara anggota komunitas yang bersangkutan.

   Fungsi tersebut biasanya masih sangat nampak di tingkatan pasar desa atau pasar dadakan yang bahkan seringkali keberadaannya tidak tercatat secara statistik di tingkat kecamatan hingga desa. Sebagian besar penjual dan pembeli yang terlibat dalam transaksi di tempat itu masih berasal dari kawasan yang bersangkutan. Hal ini menyebabkan distribusi komoditi pangan lokal masih terjadi ditingkatan yang lokal pula, kalaupun ada yang aktor luar yang ikut berperan, maka biasanya dia hanya akan membawa komoditi pangan tersebut ke kawasan yang bersebelahan dengan kawasan tersebut. Volume komoditi pangan yang diperjualbelikan di pasar ini juga biasanya tidak terlalu besar. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa di pasar ini tidak banyak aktor-aktor dari luar kawasan yang bersangkutan yang terlibat di pasar itu. Sedangkan fungsi yang kedua biasanya nampak pada pasar-pasar besar (pasar induk). Pasar ini biasanya berfungsi sebagai gerbang distribusi berbagai komoditi ke berbagai kawasan.

2. Agen Distribusi yang Melayani Kebutuhan Komunitinya
   Dalam konteks sistem pangan lokal, keberadaan penjaja keliling merupakan mata rantai yang cukup penting dalam proses

distribusi pangan lokal di kawasan penelitian. penjaja keliling merupakan pihak yang menjajakan komoditinya (yang berupa bahan makanan non beras) secara berkeliling dengan (biasanya) menggunakan sepeda atau sepeda motor. Mereka biasanya memiliki waktu, "area kerja," bahkan tempat perhentian yang tetap setiap harinya. Rutinitas ini dirasa masyarakat sangat membantu mereka karena mereka tidak perlu mencari atau menunggu kedatangannya. Bila ingin membeli kebutuhan sehari-hari, masyarakat cukup mendatangi tempat penghentiannya pada waktu yang sama setiap harinya.

Penjaja keliling merupakan aktor distribusi yang memang ada khusus untuk melayani kebutuhan suatu komuniti tertentu yang bersifat lokal. Hal ini nampak dari; ***Pertama,*** sebagian produk yang dijajakan biasanya merupakan produk yang dihasilkan oleh dari lahan miliknya. Sedangkan untuk komoditi yang tidak dapat diproduksi sendiri seperti mereka dapatkan dari pasar terdekat. Namun demikian peneliti juga menemukan beberapa penjaja keliling membeli semua komoditinya dari pasar. ***Kedua,*** "area kerja" mereka hanya berada di suatu kawasan tertentu yang bersifat lokal. Keterbatasan sarana transportasi yang mereka miliki memang membuat mereka tidak dapat "beredar" terlalu jauh dari tempat tinggalnya. ***Ketiga,*** keterbatasan modal yang dimiliki menyebabkan, komoditi yang dijajakan oleh penjaja keliling merupakan komoditi yang secara nyata memang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tinggal di komuniti tersebut. ***Keempat,*** penjaja keliling tersebut (yang berjenis kelamin perempuan) mencoba meraih ruang yang belum atau tidak digunakan oleh laki-laki. Salah satunya adalah dengan menjajakan produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tidak terlalu tinggi (bukan komoditas utama), namun menjadi kebutuhan nyata masyarakat yang tinggal di komuniti tersebut. Hal ini disebabkan mereka (sebagai perempuan) sangat memahami komoditi apa saja yang diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ruang Kedaulatan Konsumsi

Dalam pembentukan sistem pangan lokal, pengetahuan tentang pola konsumsi lokal suatu komuniti tempat prakarsa pembentukan sistem pangan lokal dilaksanakan merupakan hal yang penting. Pengetahuan ini menjadi berharga untuk diketahui karena dapat menjadi acuan bagaimana strategi mengurangi ketergantungan komuniti terhdap berbagai komoditi pangan non lokal (terutama pabrikan). Terlebih lagi dengan semakin maraknya berbagai produk panganan pabrikan (*mie instan*, kudapan, permen) yang kini telah merambah hingga ke perdesaan yang terpencil sekalipun. Peluang bagi langkah awal prakarsa pembentukan sistem pangan lokal ada pada suatu komuniti adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komuniti Masih Mengkonsumsi Panganan Lokal
   Salah satu contoh nyata dari bentuk konsumsi komoditi pangan lokal nampak ketika petani memilih untuk tidak menjual (seluruh) hasil panennya, dan menyimpannya sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangganya. Bagaimanapun juga, keputusan untuk menyimpan hasil panennya untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga merupakan suatu potensi memprakarsai pembentukan sistem pangan lokal di kawasan tersebut.

   Strategi petani menyimpan pangan tersebut ternyata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga berfungsi sebagai jaring pengaman (tabungan) untuk menghadapi berbagai musibah dan keperluan (akan uang kontan) secara mendadak seperti bila ada kerabat yang sakit, kecelakaan, biaya sekolah dan sebagainya. Mereka dapat menjual hasil panennya ke warung-warung yang ada di sekitar tempat tinggal mareka, sehingga distribusi komoditi tersebut tetap ada di kawasan yang bersangkutan. Simpanan hasil panen juga memiliki fungsi sosial misalnya untuk dipinjamkan atau diberikan kepada tetangga atau kerabat yang memerlukannya. Pemenuhan kebutuhan pangan dengan mekanisme sosial pertukaran tersebut secara nyata dapat mengurangi ketergantungan petani

pada mekanisme (pertukaran) pasar yang menunututt ketersediaan uang kontan sebagai alat tukarnya.

2. Industri Pengolahan Pangan Lokal
   Salah satu syarat untuk mendukung konsumsi lokal adalah adanya suatu industri pengolahan pangan di tingkat komuniti yang memanfaatkan bahan yang berasal dari komuniti tersebut dan memasarkannya ke anggota komuniti yang bersangkutan. Hal ini merupakan suatu bentuk nyata dari usaha pemenuhan (konsumsi) pangan secara lokal. Sementara itu, hasil produksi pangan tersebut juga banyak dikonsumsi oleh anggota komuniti yang bersangkuatan. Adanya suatu industri pengolahan pangan lokal membuat anggota komuniti memiliki pilihan untuk tidak selalu bergantung pada berbagai produk pangan yang berasal dari luar kawasan tersebut.

★★★

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistence*. New Haven, London: Yale University Press.

Sen, Amartya. 1981. Poverty and Famines, an Essay on Entitlement and Deprivation.

Setiawan, Bonnie. 2003. *Globalisasi Pertanian: Ancaman Atas Kedauatan Bangsa dan Kesejahtraan Petani*. Jakarta: The Institute for Global Justice.

Vandana Shiva. 1997. *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KONPHALINDO.

Surat kabar:
Suara Merdeka: Kamis, 26 Februari 2004
Kompas, 17 Juni 2002
Solo Post

Internet:
www.indomedia.com/bernas/092002/10/UTAMA/10jat1.htm

Laporan:
Soetisna, Usep, Nurul Sumiasri, dan Endang Tri Margawati. tt. Optimasi Pemanfaatan Lahan dengan Sistem Pekarangan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi — LIPI.

Data Statistik:

1. Rencana Tindak program pembangunan bidang pertanian (RT-P2BP) Kabupaten Klaten, Tahun 2004-2008
2. Lembaran Daerah Kabupaten Klaten, Nomor 35 Tahun 2001 Seri D Nomor 35, PP Kab. Klaten, No.35 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kab. Klaten, 2001—2005
3. Profil Sosial ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2002, Hasil Survei sosial ekonomi daerah dan Kesejahteraan Sosial, Kab. Klaten tahun 2002.
4. Buku Saku Kabupaten Klaten Tahun 2002
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten, 2002—2011, Tahun Anggaran 2001, Executive Summary
6. Keputusan Bupati Klaten Nomor 196, Tahun 2003 Tentang Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten, Tahun 2004
7. Arah dan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2004
8. Penduduk Kabupaten Klaten Akhir Tahun 2002, BPS Klaten.
9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten tahun 2002, BPS.
10. Klaten dalam Angka Tahun 2002, BPS.
11. Kecamatan Karangnongko dalam Angka, 2001, BPS.
12. Kecamatan Manisrenggo dalam Angka, 2002, BPS.
13. Kecamatan Jatinom dalam Angka, 2002, BPS.
14. Kecamatan Bayat dalam Angka, 2002, BPS.